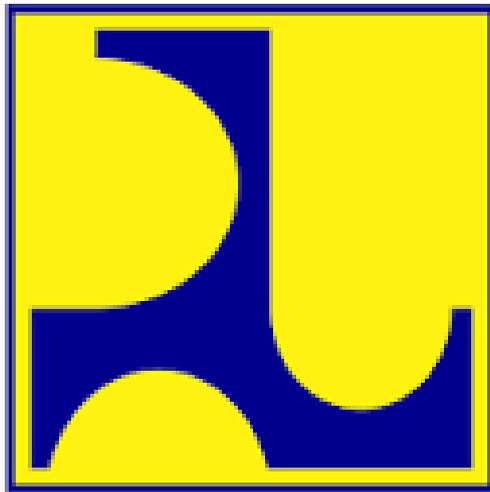


**RENSTRA PERUBAHAN
TAHUN 2016-2021**



**DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN
RUANG
KABUPATEN. BARRU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA kepada kita sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru untuk Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Kabupaten Barru serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Rancangan Akhir Renstra ini dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru selanjutnya akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru Tahun 2016- 2021, yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Barru, November 2018
Kepala Dinas PUK Barru



Herman Jaya, S.IP
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	lii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan umum.....	28
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis	56
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	59
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	59
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	66
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII. PENUTUP	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2016	15
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Struktural Tahun 2016	16
Tabel 2.3.	<i>Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2016.....</i>	16
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai berdasarkan Masa Kerja Tahun 2016.....	17
Tabel 2.5.	Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas PU Kabupaten Barru Tahun 2016.....	18
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU Tahun 2010 - 2015.....	20
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PU Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015.....	24
Tabel 2.8	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Barru.....	25
Tabel 2.9	Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Barru	25
Tabel 2.10	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Barru	26
Tabel 2.11	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Barru.....	26
Tabel 2.12	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Barru.....	26
Tabel 2.13	Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Barru.....	27
Tabel 2.14	Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Barru	27
Tabel 2.15	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Barru	28
Tabel 2.16	Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Barru	28
Tabel 2.17	Panjang Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Barru.....	29
Tabel 2.18	<i>Luas Irigasi Dalam kondisi Baik Kabupaten Barru.....</i>	29
Tabel 2.19	Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Barru.....	30
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barru	35
Tabel 3.2	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Barru.....	37
Tabel 3.3	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barru	38

Tabel 3.4	Instrumen Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif RPJMD Kab. Barru Tahun 2016-2021.....	43
Tabel 3.5	Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Tahun 2016.....	57
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barru	59
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum.....	62
Tabel 4.3	Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021.....	65
Tabel 5.1	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PU KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021.....	L1
Tabel 6.1	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Tahun 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi untuk menterjemahkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang sudah ditetapkan dengan perda, juga memuat Sinkronisasi dengan Renstra Gubernur Sulawesi Selatan dan Renstar Kementreian Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Bupati Barru no 66 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tugas dan fungsi yang berbeda pula.

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Barru, Rencana OPD memiliki peran yang strategis dalam upaya merealisasikan perencanaan pembangunan Kabupaten yang tersurat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Karena itu, Dinas PUPR sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten kembali menyusun Rencana Strategis yang merupakan revisi dari renstra sebelumnya yang selanjutnya di revisi menjadi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memuat program-program pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021.

Dengan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri no 86 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan Renstra perangkat Daerah. Maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Strategis Kerja (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra hingga penetapan akhir Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru.

Dengan tersusunya Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

sekaligus menjadi dokumen yang menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang focus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Baaru bidang PUPR.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dokumen penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Landasan Hukum yang digunakan sebagai acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5243);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025.
22. Undang-Undang No. 28/2002, tentang Bangunan Gedung
23. Undang-undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara
24. Undang-undang 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
25. Undang-Undang No. 18/2004, tentang Jalan
26. Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
27. Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
28. Undang-Undang No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
29. Undang-Undang No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan maksud :

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.;

1.3.2 Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah.
2. Menjadi acuan kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang serta pihak terkait dalam upaya pembangunan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barru meliputi 7 bab pembahasan dan satu bab penutup, sebagai berikut :

a. Bab I **Pendahuluan,**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

b. Bab II **Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.

c. Bab III **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program gubernur, telaahan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Telaah RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis.

d. Bab IV **Tujuan dan Sasaran**

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

e. Bab V **Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

e. Bab VI **Rencana Program dan Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

f. Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

g. Bab VIII **Penutup**

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 66 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru. OPD ini merupakan unsur pelaksana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam memimpin dan melaksanakan tugas pemerintahan bidang urusan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang binamarga ;
- b. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengairan ;
- c. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ciptakarya dan penataan ruang ;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat;

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

b) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang program;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Keungan; dan
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan sumber daya manusia;

c) Sekretariat terdiri dari:

- Sub Bagian Program dan Keungan;

Sub Bagian Program dan Keungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, dan melaksanakan administrasi urusan program, melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

- Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia;

Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana yg dimaksud pada Pasal 5 dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Badan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protocol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

3. Bina Marga

a) Tugas Pokok:

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Bina Marga berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Peralatan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

c) Bina Marga terdiri dari:

➤ Kepala Seksi ;

Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi peningkatan dan pemeliharaan jalan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

➤ Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan dan pemeliharaan jalan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang peningkatan dan pemeliharaan jalan.

➤ Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

➤ Seksi Peralatan

Seksi Peralatan sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf c dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan diseksi peralatan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

4. Pengairan:

a) Tugas Pokok:

Bidang Pengairan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengairan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelncaran tugas.

b) Fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Bina Operasi dan pemeliharaan irigasi ;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang sungai dan pantai; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

c) Pengairan terdiri dari:

- Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;

Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi bina operasi dan pemeliharaan irigasi berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

➤ Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi;

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pembangunan dan pemeliharaan irigasi berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

➤ Seksi Sungai dan Pantai;

Seksi Sungai dan Pantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi sungai dan pantai berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

5. Cipta Karya

a) Tugas Pokok:

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b) Fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan rehabilitasi gedung;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang tata ruang;

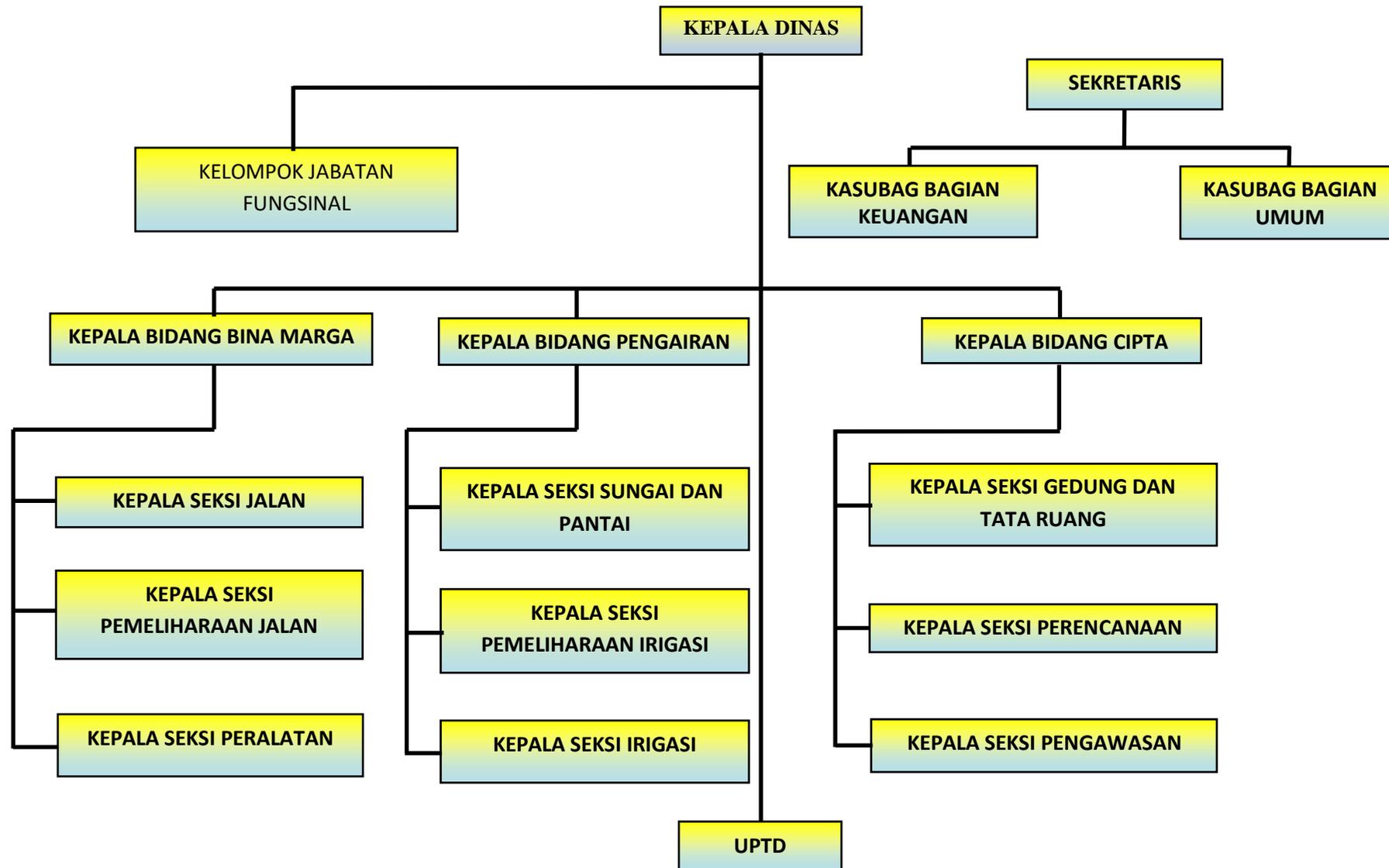
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan pengendalian IMB; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- c) Cipta Karya terdiri dari:
- Seksi Tata Ruang;
Seksi Tata Ruang dimaksud pada Pasal 19 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi Tata Ruang berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian IMB;
Seksi Pengawasan dan Pengendalian IMB dimaksud pada Pasal 19 huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pengawasan dan pengendalian berdsarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

2.1.2 Struktur Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru tersebut, maka susunan struktur organisasi dinas pekerjaan umum sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat terdiri dari;
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan
 - 2) Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
- c. Bidang Bina Marga terdiri dari;
 - 1) Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
 - 3) Seksi Peralatan
- d. Bidang Pengairan terdiri dari;
 - 1) Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi
 - 3) Seksi Sungai dan Pantai

- e. Bidang Cipta Karya terdiri dari;
 - 1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
 - 2) Seksi Tata Ruang
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian IMB.
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru secara eksplisit mengemban amanat sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam pelaksanaannya . Tugas pokok dan fungsinya dikerjakan secara profesional guna mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien. Untuk memenuhi harapan tersebut, dipandang perlu mengidentifikasi kemampuan sumber daya Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru antara lain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya kelembagaan sesuai kondisi saat ini.

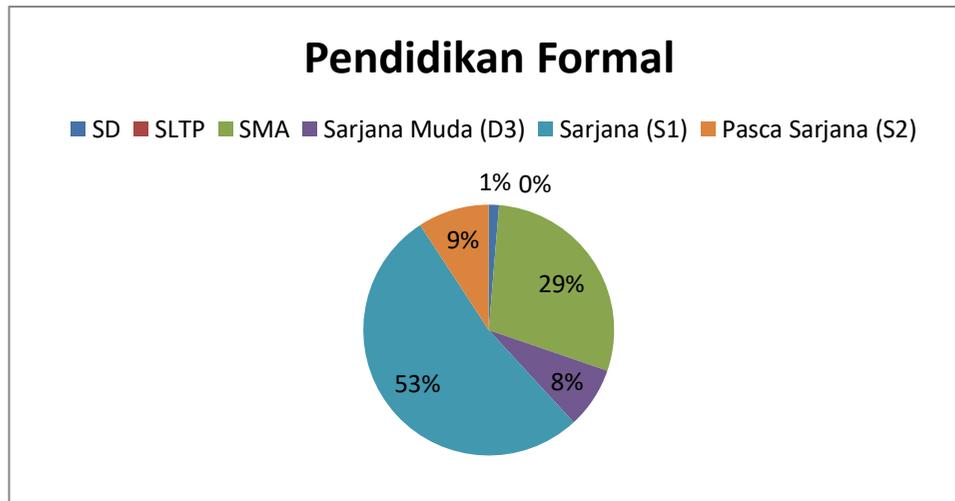
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum didukung dengan sumber daya manusia dengan personil kepegawaian sebanyak 71 orang dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal

Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Ket.
1	SD	1	
2	SLTP	-	
3	SMA	15	
4	Sarjana Muda (D ₃)	2	
5	Sarjana (S ₁)	30	
6	Pasca Sarjana (S ₂)	5	
Jumlah		53	



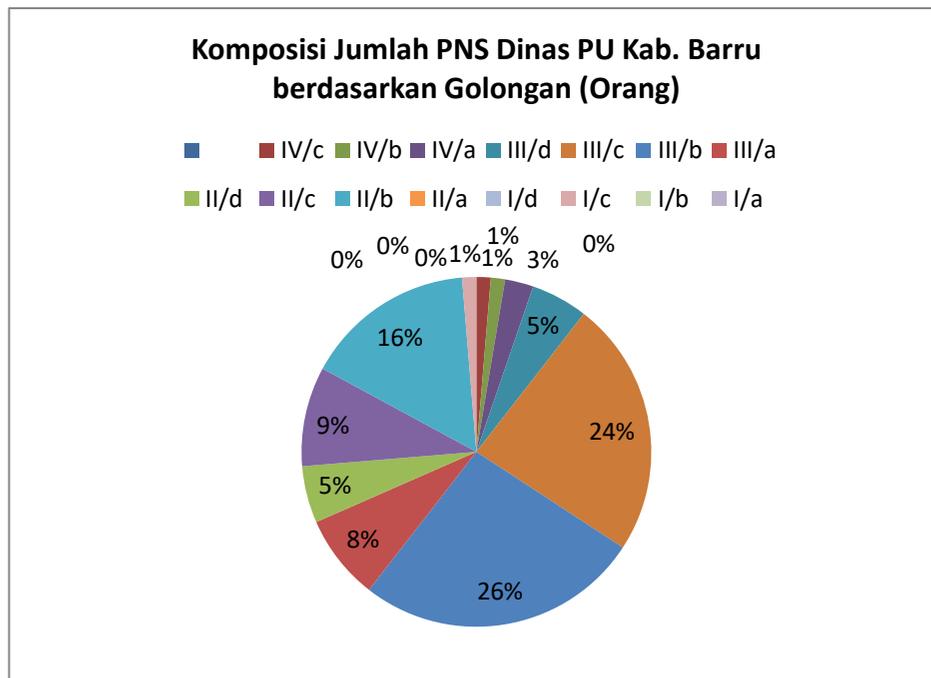
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Struktural Tahun 2016

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Ket
1	DiklatPim IV	11	
2	DiklatPim III	4	
3	DiklatPim II	1	
Jumlah		16	

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2018

Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin		Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	
IV/c	-	-	-	
IV/b	2	2	-	
IV/a	-	-	-	
III/d	12	7	5	
III/c	10	7	3	
III/b	9	6	3	
III/a	8	7	1	
II/d	-	-	-	
II/c	10	9	1	
II/b	1	1	-	
II/a	-	-	-	
I/d	-	-	-	
I/c	1	1	-	

I/b	-	-	-	
I/a	-	-	-	
Total	53	40	13	

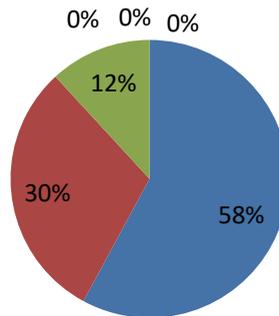


Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Masa Kerja Tahun 2017

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Ket.
1	1 s/d 10 Tahun	23	
2	11 s/d 20 Tahun	24	
3	21 s/d 30 tahun	5	
4	31 s/d 40 tahun	1	
5	41 s/d 50 tahun	-	
6	51 s/d 60 tahun	-	
Jumlah		53	

Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

■ 1 s/d 10 Tahun ■ 11 s/d 20 Tahun ■ 21 s/d 30 tahun
 ■ 31 s/d 40 tahun ■ 41 s/d 50 tahun ■ 51 s/d 60 tahun



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Perlengkapan organisasi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang saat ini terdiri atas perlengkapan berupa kantor, workshop, gudang, serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya disamping bangunan tersebut juga dilengkapi dengan kendaraan dinas, kendaraan operasional serta alat berat kebinamargaan serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas PU Kabupaten Barru Tahun 2017

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kantor	1	1		
2	Workshop	1	1		
3	Gudang	1	1		
4	Gedung Pertemuan	1	1		
5	Tempat Parkir	1	1		
6	POS jaga	1	1		
7	Grader	1	1		
8	Dump Truck	2	2		
10	Aspal mixing	1	1		
12	Asphal Sraver	3		3	
13	Concrete Mixer	2		2	
14	Alat Pegang	4	4		
16	Mesin Proses	1		1	
18	Unit Pemelihara	16		16	
20	Kendaraan Dinas	8	4	4	
22	Sepeda Motor	28	9	19	

24	Kendaraan roda 3	11	11		
26	Gerobak Tarik	5	5		
27	Gerobak Dorong	10	10		
28	Sepeda	30	30		
29	Dongkrak	8	8		
30	Digital Multimet	1	1		
31	Global Positioni	6	6		
32	Alat Ukur	1	1		
33	Meja	71	26	10	29
34	Kursi	72	40	7	8
35	Komputer	7	3	1	3
36	Laptop	16	6	2	8
37	Printer	36	8	8	20
38	Lemari	15	13	2	
39	Ekskaporator	1	1		
40	Wales	4	2	2	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru selama 5 tahun terakhir telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan pelaksanaan Renstra tahun 2010 - 2015, dapat digambarkan sesuai tabel T-C.23 dibawah.

Tabel. T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU Tahun 2010 -2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan yang layak huni dan sarana dasar bagi masyarakat				-	43.75 %	9.39 %	15.62 %	15.62 %	%	15.63 %	22.89 %	30.39 %	11.79 %	#VALUE!	35.71 %	243.77 %	194.56 %	75.48 %
2	Terpenuhinya kebutuhan sanitasi dasar pada masyarakat				1.70 %	26.76 %	27.74 %	27.25 %	16.06 %	%	5.11 %	1.30 %	22.90 %	25.10 %	0.00 %	19.10 %	4.69%	84.04 %	156.29 %
3	Tersedianya Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan				-	66.64 %	- %	40.00 %	- %	%	0.52 %	-	0.40 %	-	#VALUE!	0.78 %	#VALUE!	1.00 %	#VALUE!
4	Terpenuhinya alat-alat kebersihan				-	52.58 %	0.68 %	0.94 %	0.94 %	%	52.58 %	52.98 %	8.46 %	8.46 %	#VALUE!	100%	7791%	900%	900%
5	Meningkatnya serta terbangunnya akses jalan				11.43 km	21.36 km	23.77 km	15.61 km	21.37 km	km	7.64 km	36.85 km	16.04 km	41.06 km	0.00 %	35.78 %	155.05 %	102.73 %	192.16 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	kendaraan kedaerah terpencil																		
6	Dipertahankannya jalan dan jembatan dalam kondisi baik				7.62 km	14.24 km	15.84 km	10.40 km	14.10 km		16.35 km	26.07 km	73.45 km	71.55 km	0.00 %	114.84 %	164.57 %	706.25 %	507.30 %
7	Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat				2 desa	3 desa	2 desa	1 desa	1 desa		4.00 desa	13.00 desa	8.00 desa	16.00 desa	0%	133%	650%	800%	1600%
8	Terpenuhinya sarana infrastruktur pedesaan				60 %	-	20 %	20 %	-		-	-	-	-	0.00 %	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
9	Tersedianya dokumen pengendalian pemanfaatan ruang				-	4 paket	2 paket	4 paket	1 paket		4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	#VALUE!	100%	200%	100%	400%
10	Terpenuhinya sarana drainase perkotaan dan pedesaan				-	12.45 km	9.45 km	6.00 km	3.00 km		0.28 km	3.82 km	13.67 km	0.22 km	#VALUE!	2.25 %	40.46%	227.83 %	7.30 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
11	Terpenuhinya sarana infrastruktur pemukiman				-	40.00 %	10.00 %	20.00 %	30.00 %	%	10.00 %	40.00 %	40.00 %	30.00 %	#VALUE!	25%	400%	200%	100%
12	Panjang Jaringan yang terbangun				11703 m	5597 m	4133 m	6772 m	5181 m	m	### # m	8888 m	16354 m	35452 m	0.00 %	168.54%	215.05 %	241.49%	684.27%
13	Berkurangnya daerah rawan banjir				12.00 ha	20.40 ha	20.40 ha	20.40 ha	28.80 ha	ha	20.40 ha	14.06 ha	20.11 ha	20.23 ha	0.00 %	100.00%	68.92%	98.58 %	70.25 %
14	Jumlah lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga keagamaan yang dikembangkan				3.00 unit	3.00 unit	3.00 unit	3.00 unit	3.00 unit	unit	8.00 unit	unit	unit	unit	0.00 %	266.67%	0.00%	0.00 %	0.00 %
15	Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran				92 %	94 %	96 %	98 %	100 %	%	94 %	96 %	100 %	100 %	0.00 %	100.00%	100.00 %	102.04%	100.00%
16	Tersampaikan laporan capaian kinerja secara tepat waktu				5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	0.00 %	100.00%	100.00 %	100.00%	100.00%

Tambah capaian program

Tabel.T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Retribusi - Kebersihan		30,000,000	30,000,000	30,000,000	35,000,000		13,300,000	27,300,000	41,000,000	67,400,000		0.44	0.91	1.37	1.93		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Daerah		175,000,000	100,000,000	100,000,000	50,000,000		73,625,000	94,800,000	68,000,000	57,325,000		0.59	0.42	0.95	0.68	1.15	
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	4,108,751,326	4,010,384,099	4,176,758,225	4,801,307,114	4,222,031,612	4,010,384,099	3,916,655,000	4,061,942,946	3,988,574,050	4,211,439,418	0.98	0.98	0.97	0.83	1.00	0.01	0.01
Belanja Langsung																	
Belanja Pegawai	756,600,000	1,034,100,000	923,590,000	558,740,000	439,220,000	1,034,100,000	845,139,000	703,090,000	547,290,000	360,356,000	1.37	0.82	0.76	0.98	0.82	(0.09)	(0.23)
Belanja Barang dan Jasa	1,459,732,573	1,499,232,573	3,747,550,023	5,694,555,510	9,632,470,284	1,498,732,573	1,613,260,899	3,117,154,164	3,914,091,660	7,357,935,722	1.03	1.08	0.83	0.69	0.76	0.68	0.54
Belanja Modal	27,898,340,000	51,636,083,917	72,360,607,185	78,138,086,092	246,535,495,103	51,636,085,918.04	44,677,336,398	62,118,166,850	66,212,110,404	189,771,617,250	1.85	0.87	0.86	0.85	0.77	0.87	0.55

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru berdasarkan Indikator Kinerja sesuai Permendagri nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Untuk proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8.
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Barru

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kondisi Baik	301,431	316,343	326,529	343,879	415,433
2.	Kondisi Sedang Rusak	97,832	87,172	87,172	70,645	47,645
3.	Kondisi Rusak Ringan	49,285	46,245	43,245	43,425	23,245
4.	Kondisi Rusak Berat	219,571	218,359	211,173	210,350	181,796
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	1094,88	1094,88	1094,88	1094,88	1094,88

Sumber Data: Dinas PU Kabupaten Barru, Tahun 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi pada tahun 2011-2015, untuk jalan yang kondisi baik angkanya naik tiap tahunnya, berbanding terbalik dengan kondisi sedang rusak dan kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat menurun tiap tahunnya.

2. Rasio Jaringan Irigasi

Untuk rasio jaringan irigasi tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9.
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Barru

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jaringan primer	18647	19536	22356	22356	22356
2.	Jaringan Sekunder	42188	43733	44183	53522	60246
3.	Jaringan Tersier	67106	72545	79217	79217	79217
4.	Luas Lahan Budidaya	6638	6638	6638	9792	9792
5.	Rasio	17,28	17,98	18	15,84	16,53

Sumber Data : Dinas PU Kabupaten Barru, Tahun 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa Rasio Jaringan irigasi pada tahun 2011-2015 angkanya fluktuatif. Pada tahun 2011 sebesar 17,28 untuk kemudian naik pada tahun 2012 dan 2013 sebesar berturut-turut 17,98 dan 18, dan turun pada tahun 2014 sebesar 15,84 dan naik lagi pada tahun 16,53.

3. Panjang Jalan dilalui Roda 4

Untuk panjang jalan dilalui Roda 4 tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.15.

Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Barru

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Panjang Jalan (km)	668,119	668,119	668,119	668,119	668,119
2.	Jumlah Penduduk	167.656	168.034	169.302	170.316	171.217
3.	Rasio	3,98	3,97	3,95	3,92	3,90

Sumber Data : Dinas PU Kabupaten Barru, Tahun 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio panjang jalan dilalui roda 4 tahun 2011 sebesar 3,98 dan menurun sampai akhir periode tahun 2015 sebesar 3,90.

4. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Untuk panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.16.

Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Barru

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (km)	347,489	350,161	326,509	297,914	415,434
2.	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten	668,119	668,119	668,119	668,119	668,119
3.	Persen $= (1/2) * 100$	52,01	52,41	48,87	44,59	62,18

Sumber Data: Dinas PU Kabupaten Barru, Tahun 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) tahun 2011 sampai dengan 2015 angkanya fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2011 sebesar 52,01% untuk naik pada tahun 52,41% ditahun 2012, pada tahun 2013 turun sebesar 48,87% untuk turun lagi pada tahun 2014 sebesar 44,59 dan meningkat pada tahun 2015 62,18%.

5. Panjang Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)

Untuk Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.17.

Panjang Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) Tahun 2011- 2015
Kabupaten Barru

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Panjang Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase (km)	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13
2.	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten	688,119	688,119	688,119	688,119	688,119
3.	Persen	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66

Sumber Data: Dinas PU Kabupaten Barru, Tahun 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) tahun 2011 s.d 2015 angkanya signifikan, yakni sebesar 1,66.

6. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Untuk luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.18.

Luas Irigasi Dalam kondisi Baik
Kabupaten Barru

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	4182	4315	4447	4912	4532
2.	Panjang Irigasi	127761	135814	145756	155059	161819
3.	Persen	65%	65,53%	64,89%	50,16%	46,28%

Sumber Data: Dinas PU Kabupaten Barru, Tahun 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa luas irigasi dalam kondisi baik tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 angkanya menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2011 sebesar 65%, pada akhir periode tahun 2015 sebesar 46,28%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Barru dalam pelaksanaan kegiatan dihadapkan pada dua hal yaitu kenyataan adanya kebutuhan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang semakin meningkat dan terbatasnya sumber daya (Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Pembiayaan). Disamping itu tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan infrastruktur masih sangat bervariasi, hal ini disebabkan berbagai factor antara lain: kondisi social budaya karakteristik masing-masing wilayah, dan letak geografis yang tidak sama antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya.

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Barru dalam pelaksanaan kegiatan adalah bahwa untuk mencapai penyediaan infrastruktur yang handal dibutuhkan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan yang baik antara pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten kota, dan pengaturan ini sudah diamankan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota.

Selama ini, Pemerintah Kabupaten telah berupaya menyelenggarakan pelayanan dan penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum sebaik mungkin namun dinilai belum optimal dan capaiannya masih sangat bervariasi oleh karena itu pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum memandang perlu untuk terus mendorong kinerja pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum tersebut melalui berbagai kegiatan kinerja pemerintah daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru dalam rangka pelayanan dan penyediaan infrastruktur telah banyak mengalami kemajuan, namun demikian masih banyak yang perlu dibenahi dan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Perencanaan Strategis Dinas PUPR Kabupaten Barru tahun 2016-2021 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru 5 tahun terakhir ini masih terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.

3.1.1 internal

- a. Terbatasnya sumber daya manusia (tenaga teknis) dan sarana dan prasarana lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang

- b. Keterbatasan data dan informasi terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (data Base kebinamargaan, irigasi dan keciptaan karya)
- c. Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain baik secara vertical pemerintah pusat dan peropensi maupun secara horizontal dengan OPD lain pemkab baru dalam pembangunan infrastruktur

3.1.2 Eksternal

- a. Belum sinerginya penanganan antara jalan Nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten serta jalan desa dan lingkungan.
- b. Belum optimalnya penanganan irigasi, bendung pada lokasi rawan longsor abrasi pantai dan banjir
- c. Lemahnya penanganan hukum dalam pelaksanaan penataan ruang terutama pada garis sempadan jalan dan sungai

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mencapai misi kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten baru .

3.2.1 Visi

Dengan memperhatikan kondisi daerah, permasalahan pembangunan tantangan yang di hadapi serta isu isu strategis, dan mengacu pada visi yang telah di sampaikan oleh bupati dan wakil bupati, hasil pemilihan kepala daerah baru maka visi kabupaten baru tahun 2016 2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2016-2021 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :

1. **Lebih maju** mengandung arti ; Peningkatan berbagai indikator pembangunan akan lebih baik seperti : Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan perkapita, angka harapan hidup, kehidupan beragama dan berbagai indikator sosial, ekonomi dan politik lainnya
2. **Sejahtera** mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Barru.
3. **Taat asas** mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu pada ketentuan agama, hukum dan norma budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal
4. **Bermartabat** mengandung arti ; Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.
5. **Bernafaskan keagamaan** mengandung arti ; Seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan.

3.2.2 Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah di paparkan diatas, rumusan misi menguraikan upaya- upaya yang harus dilakukan untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan dicapai. Adapun misi kabupaten barru adalah sebagai berikut :

Misi 1. Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM

Misi 2. Mengoptimalkan pemampatan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat

Misi 3. Menciptakan lingkungan yang kondusif

Misi 4. Mengembangkan interkoneksi sinergi antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional

Misi 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat. Permasalahan dalam pengelolaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Barru sebagai berikut:

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akses jalan kabupaten belum lancar	Masih tingginya tingkat kerusakan jalan dan jembatan	Fasilitas penunjang pelengkap jalan kurang memadai
2.	Hilirisasi pertanian belum menyeluruh	Daerah irigasi (DI) untuk sawah yang masih kurang	Petani masih menggunakan sawah tada hujan
3.	Belum optimalnya penanggulangan banjir	Erosi, Longsor dan abrasi pantai	Pendangkalan aliran sungai
4.	Rendahnya kualitas Gedung Negara	Perhitungan keandalan bangunan gedung Negara belum optimal	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bidang jasa konstruksi
5.	Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang	Belum lengkapnya rencana detail tata ruang kecamatan	Standar pemetaan wilayah yang tidak jelas

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mencapai visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru 2016-2021. Adapun visinya yaitu;

“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2016-2021 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :

1. **Lebih maju** mengandung arti : Peningkatan berbagai indikator pembangunan yang akan lebih baik seperti: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan perkapita, angka harapan hidup, kehidupan beragama dan berbagai indikator sosial, ekonomi dan politik lainnya.
2. **Sejahtera** mengandung arti : Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Barru.
3. **Taat asas** mengandung arti : Pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu pada ketentuan hukum dan norma budaya/adat istiadat serta kearifan lokal.
4. **Bermartabat** mengandung arti : Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.
5. **Bernafas keagamaan** mengandung arti : Seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah

kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi Kepala Daerah yang berkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah misi keempat yaitu; Mengembangkan interkoneksi sinergis serta wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional dan misi kelima yaitu; Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Seiring dengan harapan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mampu mewujudkan Visi Kepala Daerah 2016-2021 melalui pelaksanaan fungsi Dinas PUPR.

Sesuai dengan misi lima tersebut ada beberapa isu strategis terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam tujuan RPJMD Kabupaten Barru tahun 2016-2021 yaitu:

“MISI-4 : Mengembangkan Interkoneksi Sinergis Antar Wilayah di Tingkat Nasional, Regional dan Internasional.”

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 disebutkan visi Kementerian PUPR adalah:

“Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian PUPR memiliki 5 visi, dimana 3 diantaranya terkait dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.

Permasalahan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.

Permasalahan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang PUPR di Indonesia adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi penduduk; menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan provinsi/kabupaten/kota; serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terlamhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari sasaran jangka menengah antara lain:

1. Koordinasi dan komitmen,

2. Pembagian kewenangan,
3. Perbedaan wilayah geografis,
4. Pertumbuhan ekonomi,
5. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Barru untuk memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat atau dunia usaha.

Untuk mendapatkan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum untuk periode 2016-2021, agar sesuai dengan arahan RTRW, perlu dilakukan telaahan terhadap Rencana Struktur Ruang Kota, dan telaahan terhadap Rencana Pola Ruang Kota yang dituju.

Hasil telaahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap dokumen RTRW Kabupaten Barru, diketahui bahwa sebagian besar indikasi program yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditentukan dalam RTRW.

Tabel 3.2. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Barru

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Pola Ruang pada Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
1.	Perwujudan Kawasan Lindung	Perwujudan Kawasan Lindung	Normalisasi dan pemanfaatan WS Saddang dan DAS lainnya	Normalisasi sungai	Dinas PUPR
			Normalisasi dan pemanfaatan Pesisir Pantai	Pengerukan sungai	Dinas PUPR
2	Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya	Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya	1. Rehabilitas dan Pengembangan Kawasan Potensi Permukiman		
			a. Penataan permukiman sepanjang Bantaran Sungai dan Pantai	Penataan Lingkungan Pemukiman Kawasan Perkotaan dan Pedesaan	Dinas PUK
			b. Pengendalian pengembangan permukiman kearah perbukitan dengan kemiringan diatas 40%	-	Dinas PUK.

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Pola Ruang pada Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
			c. Penerapan KDB rendah pada kaw. permukiman & bangunan lainnya pada lokasi dengan kemiringan antara 15%-40%	-	Dinas PUK.
3.	Perwujudan Kawasan Strategis	Perwujudan Kawasan Strategis	1. Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan		
			a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sungai Barru	Pembangunan Tanggul Banjir	Dinas PUPR

Tabel 3.3. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barru

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
1	Peningkatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Barru	Peningkatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Barru			

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas PU PR
			Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pemerintahan	1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas PUPR
2	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kawasan Perkotaan Mangkoso Kec. Soppeng Riaja	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kawasan Perkotaan Mangkoso Kec. Soppeng Riaja			
4	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kawasan Perkotaan Ralla Kecamatan Tanete Riaja	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kawasan Perkotaan Ralla Kecamatan Tanete Riaja			
			Pembangunan /Peningkatan RTH /tempat bermain /LOR	-	Dinas PU Kab.

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
5	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kawasan Perkotaan Takkalasi di Kecamatan Balusu	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kawasan Perkotaan Takkalasi di Kecamatan Balusu			
			Pembangunan /Peningkatan RTH/tempat bermain/LOR	-	Dinas PUK
			Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan	Pengadaan TPS dan Penanganan Kebersihan	Dinas PUK
			Pengembangan sumber daya air dan instalasi air minum	1. Pembangunan Sarana Air Bersih 2. Penyediaan Sarana Air Bersih 3. Instalasi Air Minum	Dinas PUK
6	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kawasan Perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kawasan Perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau			
			Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan	Pembangunan Pengolahan Persampahan 3R dan Penanganan Kebersihan	Dinas PUK

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
			Pengembangan sumber daya air dan instalasi air minum	1. Pembangunan Sarana Air Bersih 2. Penyediaan Sarana Air Bersih 3. Instalasi Air Minum	Dinas PUK
7	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kawasan perkotaan Doidoi Kec. Pujananting	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kawasan perkotaan Doidoi Kec. Pujananting			
			Pengembangan sumber daya air dan instalasi air minum	1. Pembangunan Sarana Air Bersih 2. Penyediaan Sarana Air Bersih 3. Instalasi Air Minum	Dinas PUK
8	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)			
			Pengembangan sumber daya air dan instalasi air minum	1. Pembangunan Sarana Air Bersih 2. Penyediaan Sarana Air Bersih 3. Instalasi Air Minum	Dinas PUK.
9	Mendorong Perwujudan Sistem Transportasi Kabupaten	Mendorong Perwujudan Sistem Transportasi Kabupaten	Peningk. jaringan jalan Arteri Primer, yaitu jalan Trans Sulawesi dari perbatasan Kota Parepare sampai ke perbatasan Kab. Pangkep.	1. Pembangunan Jalan, 2. Peningkatan Jalan, 3. Pemeliharaan Jalan	Dinas PU Prov.

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
			Peningk. jaringan jalan Kolektor Primer penghubung terminal Mattirowalie – Lempang – Lompo Riaja – Libureng – Perbatasan Kabupaten Soppeng.	1. Pembangunan Jalan, 2. Peningkatan Jalan, 3. Pemeliharaan Jalan	Dinas PU Prov dan Dinas PUPR Kab.
			Pembangunan dan peningk ruas jalan kolektor primer Takkalasi- Baera-Panasa – Perbatasan Soppeng.	1. Pembangunan Jalan, 2. Peningkatan Jalan, 3. Pemeliharaan Jalan	Dinas PU Prov. Dan Dinas PUPR Kab.
			Pembangunan dan peningk ruas jalan kolektor sekunder Gempunge – Lampoko, (Gempunge- Garongkong- Lalengkacipireng- Lipukasi-Coppo- Tuwung-Sepe'e- Binuang-Riatang Salo- Lampoko)	1. Pembangunan Jalan, 2. Peningkatan Jalan, 3. Pemeliharaan Jalan	Dinas PUPR Kab
			Ruas jalan kolektor sekunder Bungi – Parenring, (Bungi- Lapabila-Parenring).	1. Pembangunan Jalan, 2. Peningkatan Jalan, 3. Pemeliharaan Jalan	Dinas PU Kab.

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
			Ruas jalan kolektor sekunder Lompo Riaja-Lempang, (Lompo Riaja-Parenring-Doi doi-Pattuda-Jempulu-Pumbadere-Lempang-Perbatasan Kab.Bone).	1. Pembangunan Jalan, 2. Peningkatan Jalan, 3. Pemeliharaan Jalan	Dinas PUPR Kab.
			Ruas jalan kolektor sekunder Pekkawatu-Mangempang, (Pekkawatu-Pallaka-Kaerenge-Lakonrae-Batubessi-Mangempang).	1. Pembangunan Jalan, 2. Peningkatan Jalan, 3. Pemeliharaan Jalan	Dinas PUPR Kab.
			Ruas jalan kolektor sekunder Kaerenge-Takkalasi, (Kaerenge-Barang-Kalompie-Desa Kamiri-Lawampang-Takkalasi)	1. Pembangunan Jalan, 2. Peningkatan Jalan, 3. Pemeliharaan Jalan	Dinas PUPR Kab.
			Ruas jalan kolektor sekunder Kamiri-Mangkoso, (Kamiri-Lasanre-Desa Paccekke-Kiru kiru-Mangkoso)	1. Pembangunan Jalan, 2. Peningkatan Jalan, 3. Pemeliharaan Jalan	Dinas PUPR Kab.
			Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalan Lokal	1. Pembangunan Jalan, 2. Peningkatan Jalan, 3. Pemeliharaan Jalan	Dinas PUPR Kab.

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
			Primer		
10	Mendorong Perwujudan Sistem Sumberdaya Air	Mendorong Perwujudan Sistem Sumberdaya Air	Melestarikan dan memanfaatkan DAS Barru.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Dinas PUPR Kab.
			Melestarikan dan mengemb.DI Kewenangan Kabupaten.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas PUPR Kab.
			Peningkatan Teknologi Pertanian	-	Dinas PUPR Kab.
			Pembangunan dan Peningkatan IKK/SAB Perdesaan	Optimalisasi Jaringan Distribusi IKK	Dinas PU Kab.
			Pembangunan Bendung dan Cekdam	Pembangunan dan Peningkatan Saluran dan Bendung	Dinas PUPR

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Dinas PU merupakan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang direncanakan sudah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kajian ini juga ditujukan untuk menelaah bahwa tidak ada program atau kegiatan yang direncanakan akan menimbulkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel 3.4. Instrumen Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif
RPJMD Kab. Barru Tahun 2016-2021

No	TPB	Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	TARGET NASIONAL (PERPRES 59/2017)	Sasaran Strategis	Draft Isu Strategis	Analisis D3TLH	Proyeksi Capaian Indikator TPB	Strategi dan Arah Kebijakan	Outcome/ Program	Kegiatan
1	15	EKOSISTEM DARATAN	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan		51.1	Meningkat	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Belum terciptanya jaminan pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Indikator ini terkait dengan jasa ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati dengan kategori tinggi terdapat di Kec. Pujananting seluas 14502,86 ha, kec. Mallusetasi seluas 13582,21 Ha, Kec. Barru seluas 58,48, Kec. Balusu seluas 63,75, Kec. Tanete Riaja seluas 5580,04 Ha, Kec. Soppeng Riaja seluas 3514,63 Ha dan Kec. Tanete Rilau seluas 724,88 Ha. Kategori sangat tinggi terdapat di Kec. Pujananting seluas 170,59 ha, kec. Mallusetasi seluas 130,44 Ha, Kec. Tanete Rilau 108,46 Ha, Kec. Tanete Riaja seluas 90,93 Ha, Kec. Balusu seluas 63,75 Ha, kec. Barru seluas 58,48 Ha dan Kec. Soppeng Riaja seluas 51,17 Ha.	grafik proyeksi	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan pemanfaatan ruang	

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi dilakukan berdasarkan factor factor pelayan OPD yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari gambaran pelayanan OPD. Sasaran jangka menengah pada renstra K/L, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan OPD serta disesuaikan dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berdasarkan factor tersebut diatas dapat ditetapkan isu-isu yang dihadapi dalam pengelolaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan berbagai pertimbangan :

1. Memiliki pengaruh terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD
2. Berpengaruh terhadap pencapaian sasaran K/L
3. Berpengaruh terhadap pencapaian sasaran renstra dalam RPJMD.
4. Berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi OPD
5. Berpengaruh terhadap publik

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis pada renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan kajian terhadap :

- a. Tingkat kerusakan jalan sangat tinggi, berbanding terbalik dengan kemampuan dari terbatasnya kemampuan dan pemeliharaan jalan sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dan rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pemeliharaan jalan.
- b. Pembangunan rel kereta api berdampak pada tingginya kerusakan jalan terutama pada daerah pengambilan material “quarry”.

- c. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di kawasan pegunungan belum memadai dan belum merata.
- d. Koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait yang membutuhkan penanganan akses jalan dan jembatan, belum terjalin dengan baik seperti akses jalan jembatan menuju kawasan industri, sentra produksi/budidaya.
- e. Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan serta pengelolaan tata ruang dan perencanaan infrastruktur jaringan belum memadai.
- f. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau belum maksimal.
- g. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan serta perlindungan ruang terbuka hijau masih minim.
- h. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai serta tanggul pantai belum memadai.
- i. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir belum optimal.
- j. Pembangunan prasarana pengaman pantai belum memadai.

Hasil kajian tersebut diatas disimpulkan sebagai isu Strategis pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru tahun 2016 – 2021 sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.2. dari table dimaksud, diketahui bahwa terdapat 5 kelompok isu strategis bidang pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru, yang perlu diprogramkan penanganannya melalui Renstra Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru tahun 2016 – 2021.

Tabel 3.5.
ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARRU TAHUN 2016

NO	BIDANG LAYANAN DINAS PUPR	ISU STRATEGIS
1	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan administrasi dan kualitas program perencanaan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah belum optimal - Kapasitas pengendalian monev terhadap hasil pelaksanaan program kegiatan (pengolahan data) belum akurat - Sarana dan prasarana kelengkapan kantor belum maksimal
2	BIDANG BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruhnya jalan dan jembatan serta pelengkap jalan dalam kondisi mantap (masih ada jaringan jalan dalam kondisi rusak berat, sedang dan ringan)

		<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana kebina margaan belum optimal
3	BIDANG CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan masyarakat akan perumahan / rumah layak huni dengan penyediaan listrik semakin meningkat - Belum optimalnya Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW
4	BIDANG IRIGASI	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat defisit air irigasi pada beberapa daerah irigasi dimusim kemarau dan beberapa saluran irigari, bangunan irigasi dalam kondisi rusak - Beberapa lokasi dan wilayah terdapat tanggul sungai yang rusak sehingga perlu penanganan dan pencegahan banjir dan longsor

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan perangkat daerah dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur.
2. Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan serta pelaporan keuangannya pada Dinas PUPR.

Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja).

Adapun sasaran perangkat daerah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.
2. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebinamargaan.
3. Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang.
4. Meningkatnya ketersediaan unsur-unsur yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR
5. Meningkatnya akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan uraian pada Dinas PUPR.

Tabel. 4.1 . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2016-2021					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Tujuan : Meningkatkan penyediaan infrastruktur.		Cakupan infrastruktur dalam kondisi mantap dan berkelanjutan						
		Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	378,38 km 55,37%	428,554 km 62,71%	487,744 km 71,37%	495,435 km 72,49%	503,294 km 73,65%	511,289 km 74,82%
			Jumlah jembatan dalam kondisi baik				108 unit 55,67%	111 unit 57,21%	114 unit 58,76%
			Bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	53%	57%	61%	64%	67%	70%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2016-2021					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	9,412 km 96,11%	14 km %	15,6 km 60,5%	9,327 km 95,25%	18,45 km 18,84%	18,4 km 18,79%
			Jumlah gedung Negara yang terbangun	10 Unit	20 Unit	17 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit
			Terpenuhinya fasilitas umum perkotaan/pedesaan	1 unit	1 unit	-	-	2 unit	2 unit
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebinamargaan	Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi layak	2 unit	3 unit		8 unit	10 unit	12 unit
		Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang	35,25%	36,12%	41,58%	46,62%	51,74%	56,47%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2016-2021					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Tujuan :Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan serta pelaporan keuangannya pada Dinas PUPR		Persentase keterpenuhan dukungan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketersediaan unsur* yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR	Persentase Ketersediaan dukungan administrasi perkantoran, secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ketersediaan dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan uraian pada Dinas PUPR	Nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pada Dinas PUPR	C 30	C 30	C 30	C 30	CC 50	CC 50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diingikan dalam rencana strategis Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Barru tahun 2016-2021 dipandang perlu menetapkan strategi dan kebijakan yang merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam dalam pengembangan atau pelaksanaan program kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dalam pencapaian visi misi Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Barru.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2016-2021.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun mendatang.

Pada Table 5.1 di bawa ini akan menunjukkan relevansi dan konsistensi pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Dinas PUPR sebagai berikut :

Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021

MISI IV : Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan : Meningkatkan penyediaan infrastruktur.	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.	1 Optimalisasi keterpenuhan kebutuhan infrastruktur.	1 Pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan kabupaten. Pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jembatan. 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan daerah irigasi. 4 5 Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor. 5 Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum perkotaan dan pedesaan.
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebinamargaan	1 Optimalisasi peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan.	1 Pengadaan dan pemeliharaan alat dan peralatan kebinamargaan.
	Terpenuhinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang	1 Optimalisasi kesesuaian pemanfaatan ruang.	1 Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

MISI IV : Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan : Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan serta pelaporan keuangannya pada Dinas PUPR	Meningkatnya ketersediaan unsur* yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR	1 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan penata usahaan keuangan.	1 Penyediaan data administrasi umum, kepegawaian dan pengelolaan administrasi keuangan.
	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan uraian pada Dinas PUPR	1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan.	1 Penyediaan dokumen perencanaan renstra, renja dan dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai visi, misi, Bupati dengan mengacu sasaran tujuan, RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian renstra 2016 – 2021 di landasi dengan indicator kinerja maka di lakukan penyusunan program dan kegiatann serta pagu indikatif pendanaan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
 - Pembangunan Gedung Kantor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Meubeleur
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan laporan semesteran
 - Penyusunan laporan akhir tahun
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Penyusunan RKA dan DPA
 - Penyusunan RKA dan DPA Perubahan
 - Penyusunan Renstra SKPD
 - Penyusunan Renstra SKPD Perubahan
 - Penyusunan Renja SKPD
 - Penyusunan Renja SKPD Perubahan
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- Perencanaan Pembangunan Jalan
 - Survey Kontur Jalan dan Jembatan
 - Pembangunan Jalan
 - Perencanaan Pembangunan Jembatan
 - Pembangunan Jembatan
6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- Pengadaan Alat-alat Berat
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat
 - Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- Pembangunan/ Peningkatan Saluran dan Bendung
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah di bangun
9. Program Pengendalian Banjir dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
 - Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
 - Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir
10. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
11. Program pengendalian pemanfaatan ruang dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
 - Pengawasan pemanfaatan ruang
 - Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
12. Program pembangunan dan pemeliharaan gedung negara
- Pembangunan gedung negara
 - Pemeliharaan gedung Negara

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PUPR
SULAWESI SELATAN/KABUPATEN BARRU/KOTA BARRU

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	LOKASI	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RENSTRA SKPD				
						Target	Rp,-	Target	Rp,-	Target	Rp,-	Target	Rp,-	Target	Rp,-	Target	Rp,-	Target	Rp,-			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan				Persentase keterpenuhan dukungan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
	Meningkatnya ketersediaan unsur* yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Dinas PUPR			Persentase Ketersediaan dukungan administrasi prkntoran, sarana/prasarana aparatur, peningkatan kapasitas disiplin aparatur, dan pningkatan kapasitas SDM aparatur secara tepat waktu.		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
		1 03 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi		100%	527,922,277	100%	641,513,695	100%	563,237,225	100%	677,161,500	100%	609,445,350	100%	578,973,081	100%	3,598,253,128	Sekretariat		
		1 03 01 01 01	1. Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah surat		2241 eks	163,844,050	2878 eks	189,988,500	3515 eks	126,854,950	4162 eks	185,104,000	4789 eks	187,854,000	5426 eks	187,854,000	eks				
				Honorarium pegawai tetap / tidak tetap	org	17 org	94,349,900	16 org	120,000,000	16 org												
				- Tersedianya ATK	46 Jenis	46 Jenis	24,824,150	46 Jenis	25,000,000	46 Jenis	27,500,000	46 Jenis	27,500,000	46 Jenis	30,250,000	46 Jenis	31,762,500	46 Jenis				
				- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	50.000 lembar + 300 exp jilid	50.000 lembar + 300 exp jilid	18,750,000	55.000 lembar + 300 exp jilid	19,000,000	60.000 lembar + 300 exp jilid	20,900,000	60.000 lembar + 300 exp jilid	20,900,000	60.000 lembar + 300 exp jilid	20,900,000	60.000 lembar + 300 exp jilid	20,900,000	60.000 lembar + 300 exp jilid	395.000 lembar + 2100 exp jilid			
				Belanja Makanan dan Minuman	90 OH	25,920,000	58 OH	16,704,000														
		1 03 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	3 rekening	3 rekening	39,982,032	3 rekening	40,321,098	3 rekening	53,400,000	3 rekening	74,000,000	3 rekening	53,400,000	3 rekening	53,400,000	3 rekening				
		1 03 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dan Pembayaran STNK kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dinas/operasional dan Pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	50 unit	20 unit	29,783,570	17 unit	51,954,000	17 unit	39,000,000	17 unit	43,000,000	17 unit	42,000,000	17 unit	29,783,570	60 Unit				
		1 03 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor	2 orng	2 orng	9,600,000	2 orng	9,600,000	2 orng	9,600,000	2 orng	9,600,000	2 orng	9,600,000	2 orng	9,600,000	2 orng				
		1 03 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	4 jenis	4 jenis	9,790,000	6 jenis	6,900,000	3 jenis	6,400,000	3 jenis	10,000,000	3 jenis	6,900,000	3 jenis	9,790,000	6 jenis				
			01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	-	-	-	0	0	0	1 jenis	5,000,000	1 jenis	5,000,000	1 jenis	5,000,000	1 jenis				
			01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	22		0	0	0	0	22 jenis	0	22 jenis	0	22 jenis		22 jenis				

			1	03	01	05	02	2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	8	org	-	-	0	0	0	0	2 org	11,000,000	2 org	10,000,000	2 org	10,000,000	18 org		
			1	03	01	05	03	3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta BinteK implementasi peraturan perundang-undangan	37	org	-	-	0	0	0	0	7 org	10,219,500	7 org	10,000,000	7 org	10,000,000	70 org		
	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan uraian pada Dinas PUPR								Nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pada Dinas PUPR																	
			1	03	01	06		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KETAHAPAN	Outcome : Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	16,064,000	100%	28,592,000									100%	44,656,000	Sekretariat	
			1	03	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP dan PK SKPD	2	dok	0	0	2 Dokumen	960,000											
			1	03	01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2	dok	2 dok	1,500,000	2 dok	2,166,000											
			1	03	01	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	dok	1 dok	1,500,000	1 dok	2,166,000											
			1	03	01	06	05	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD	4	dok	4 dok	12,068,000	4 dok	18,340,000											
			1	03	01	06	06	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	2	dok	2 dok	996,000	2 dok	1,240,000											
							07	Penyusunan RKA dan DPA Perubahan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA			2 Dokumen	-	2 Dokumen	1,240,000											
								Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra SKPD			1 Dokumen	-	-	-											
								Penyusunan Renstra SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Renstra SKPD			1 Dokumen	-	-	-											
							11	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD			1 Dokumen	-	1 Dokumen	1,240,000											
							11	Penyusunan Renja SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Renja SKPD			1 Dokumen	-	1 Dokumen	1,240,000											
Meningkatkan penyediaan infrastruktur.									Cakupan infrastruktur dalam kondisi mantap dan berkelanjutan																	
	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.								Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik																	
									Jumlah jembatan dalam kondisi baik																	
			1	03	01	15		PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	67.96	67.96	109,795,420,030	71.00	119,448,322,938.00	74.00	141,295,888,150	77.00	54,308,731,432	80.00	36,253,137,672	83.00	51,379,341,528	83.00	512,480,841,750	Bidang Bina Marga	
			1	03	01	15	01	Perencanaan Pembangunan Jalan	Rencana panjang jalan yang akan dibangun	-	0	-	0	-	0	-	20 km	300,000,000	11 km	250,000,000	17 km	300,000,000				
			1	03	01	15	02	Survey Kontur Jalan dan Jembatan	Panjang survey kontur jalan dan jembatan	-	0	-	0	-	0	-	20 km	50,000,000	11 km	50,000,000	17 km	50,000,000				

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah sebagai mana pada Tabel. 7.1

Tabel. 7.1. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
		Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,60	0,55	61	0,65	0,69	0,72	0,72	0,72
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	3,90	3,98	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	48,60	62,71	68,41	72,07	75,73	79,39	83,04	83,04
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	1,62	1,62	1144	1,63	1,64	1,66	1,67	1,67
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	79,24	90,04	90,04	92,62	92,84	93,07	93,29	93,29
6	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	46,28	46,53	46,61	46,77	46,94	47,10	47,26	47,26
8	Rasio Jaringan Irigasi	16,53	18,15	18,56	19,47	20,39	21,31	22,23	22,23

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
		Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Presentase penduduk berakses air minum	50,13	53,53	60,7	69,62	78,45	87,19	95,85	95,85
10	Persentase areal kawasan kumuh	0,26	0,26	0,26	0,21	0,16	0,11	0,06	0,06
11	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			1.274,44	3.226	3.21	3.194	3.179	3.179

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Barru merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja kami selain itu juga di jadikan sebagai acuan dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan selama lima tahun

Dokumen ini mencakup jangka waktu rentang tahun 2016 - 2021 sesuai dengan RPJMD dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJP daerah 2010 - 2025 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM Nasional maupun dalam renstra kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Rencana strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review dan apabila terjadi perubahan - perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku seperti yang telah kita laksanakan perubahan renstra dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten barru saat ini

Demikian penyusunan rencana strategis ini, semoga menjadi dokumen yang dapat bermamfaat bagi organisasi perangkat daerah, terkhusus pada Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Barru.

Barru, November 2018
KepalaDinas PUPR



Herman Jaya, S.IP

NIP. 19680414 199203 1 011